

**PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PRAKTEK
PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER

NIM : 10500113151

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban)”**, ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Makassar, 20 Februari 2018

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad', followed by a long horizontal line extending to the right.

MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER

NIM: 10500113151

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban)", yang disusun oleh saudara Muhammad Thamrien Chaier, NIM: 10500113151, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Februari 2018

6 Jumadil Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Munir Salim, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Erlina, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 196904141986031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan kepada Baginda Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban)”.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orangtua Ayahandaku Thamsar, S.P., M.Si dan Ibundaku Chaeran Rasjid. Kepada Adik-adikku yang senantiasa riang, Kakek, Nenek, Om, Tante, Saudara sepupuku yang senantiasa mendorong serta memotivasi Penulis, keluarga besar dan kepada seluruh orang yang telah memberikan segenap dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Erlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah senantiasa sabar memberikan bimbingan, saran serta kritik kepada penulis.
4. Ibu Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Para Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali ilmu.
5. Pengadilan Negeri Bantaeng beserta jajarannya yang telah membantu, meluangkan waktu dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian di Kab. Bantaeng.
6. Teman-teman KKN Angk. 54 Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Posko Desa Pantama. Terkhusus pada Team Posko *Olots-olots Kuttu*, yang tidak lelah memberi makan dan memandikan sapi (*baca : seperti anak sendiri*)
7. Teman-teman senior, *letting*, dan junior yang selalu mengisi hari-hari penulis; Sri Rahayu Kartika, S.H., Zulqadri Razoeb, S.H., Nasrullah, S.Pd., Irwandi, S.H., Rico Yohannes Sammy, S.H., Muhammad Saad, S.H., Ricy Senapati Sagita, S.H., Suriadi Saputra, S.H., Wahyuriani, S.H., Adiwinata Anwar, S.H., Asriandi, S.H., Gita Larasati, S.H., Nurkhalisah Naisy, S.H., Suci Ramdayani, S.H., Satriani, S.Ip., teman-teman se-Fakultas Syari'ah dan Hukum (*yang kemungkinan marah jika*

namanya tidak saya cantumkan) serta teman-teman di Fakultas lain dalam lingkup UIN Alauddin Makassar.

8. Linkin Park, Coldplay, Peterpan (*sekarang NOAH*), Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, Jonathan Black, Robert Greene, Karen Amstrong, Haruki Murakami, Agus Mustofa, Fauz Noor, Dee Lestari, Donny Dhirgantoro, Team Power Ranger, Para Ultraman, Naruto beserta jajarannya, Spongebob Squarepants dan segenap warga Bikini Bottom yang telah mempengaruhi hidup Penulis, menemani proses pengetikan dan memberi ide dalam penulisan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini telah mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin berterima kasih kepada setiap orang yang telah datang dalam hidup penulis, yang mengilhami, menyentuh dan menerangi melalui kehadirannya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini kedepan.

Akhirnya besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Makassar, 10 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	x
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II – TINJAUAN TEORETIS	15
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	15
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	15
2. Tujuan dan Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	16
3. Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana	18
B. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	22
1. Acara Pemeriksaan Biasa	22
2. Acara Pemeriksaan Singkat	25
3. Acara Pemeriksaan Cepat.....	27
C. Teori dan Sistem Pembuktian	29
1. Pengertian Pembuktian.....	29
2. Teori Sistem Pembuktian dan Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP.....	30
D. Alat Bukti.....	34
1. Alat Bukti yang Sah Menurut Undang-Undang	34
2. Keterangan Saksi	36
E. Tentang Saksi Mahkota	45

1. Pengertian Saksi Mahkota.....	45
2. Pro Kontra Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota	47
F. Saksi dalam Perspektif Islam.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	49
2. Saksi Mahkota Menurut Hukum Islam	50
G. Kerangka Berpikir	55
BAB III – METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	58
E. Instrumen Penelitian.....	59
F. Teknik Pengolahan dan Analisis	59
G. Pengujian Keabsahan Data	61
BAB IV – HASIL PENELITIAN	62
A. Penerapan Hukum Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana ...	62
1. Landasan Hukum Penerapan Saksi Mahkota	62
2. Syarat-Syarat Diajukannya Saksi Mahkota.....	66
3. Saksi Mahkota Pada Pemeriksaan Tingkat Pengadilan	73
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota.....	74
1. Tentang Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/Pn.Ban	74
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/Pn.Ban.....	97
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN. Ban Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana	104

BAB V – PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Implikasi Penelitian	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

NAMA : Muhammad Thamrien Chaier

NIM : (10500113151)

JUDUL : Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan No./Pid.Sus/2016/PN.Ban)

Skripsi ini menjelaskan tentang Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan hukum saksi mahkota dalam praktek peradilan pidana Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota dipersidangan?. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Saksi mahkota adalah saksi yang dihadirkan oleh para penegak hukum sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana dalam suatu persidangan. Adapun penerapan atas saksi mahkota apabila ingin dihadirkan dalam suatu persidangan yakni jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; antara kedua terdakwa merupakan perkara yang sama; telah dilakukan pemecahan berkas perkara (splitsing) sebagaimana amanat Pasal 142 KUHAP; dalam keadaan minim alat bukti; serta bersedianya seorang terdakwa satu untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara terdakwa yang lainnya. 2) Pertimbangan Hakim terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban dituangkan dalam putusan sebagai keterangan saksi biasa sebagaimana saksi pada umumnya. Saksi mahkota dalam pertimbangan oleh Hakim dilandasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, serta dengan mempertimbangkan Pasal 168 KUHAP yang mengatur tentang pengecualian untuk menjadi saksi dan Pasal 142 KUHAP yang menerangkan diharuskannya perkara dipisah sebagai syarat mutlak atas penggunaan saksi mahkota dalam persidangan.

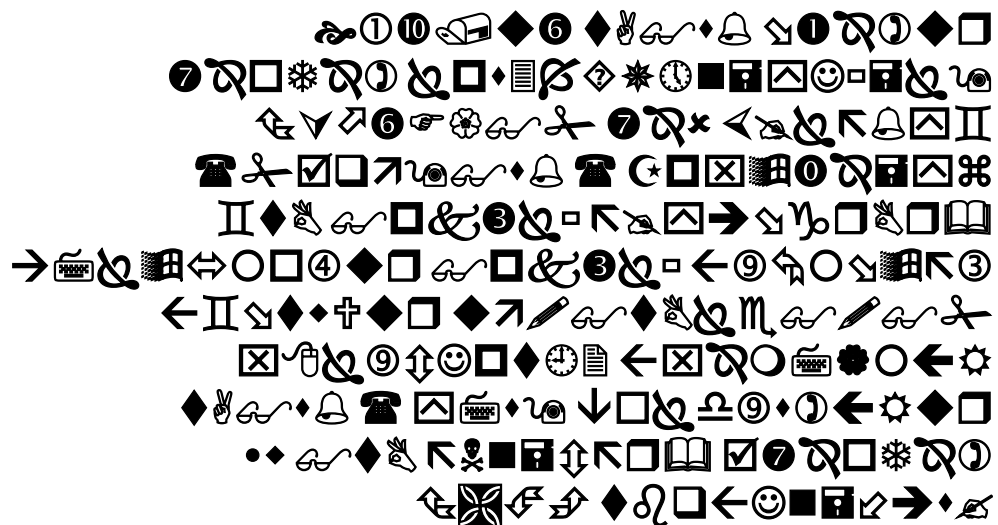
Implikasi dari penelitian ini yaitu perlunya suatu undang-undang khusus yang mengatur secara tegas akan keberadaan saksi mahkota dalam peradilan pidana. Dan penghargaan Hakim yang mengadili suatu perkara pidana kepada terdakwa oleh yang telah bersedia dirinya menjadi saksi mahkota berupa pengurangan pidana amat sangat diperlukan dalam penerapan saksi mahkota.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk hidup di bumi dengan segala kelebihanannya dibanding makhluk lainnya, untuk senantiasa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Manusia diciptakan menjadi Khalifah di bumi, mempunyai kewajiban untuk mengelola, memelihara dan bersikap ramah terhadap alam semesta sesuai dengan ajaran agama. Penjelasan ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 30:



Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan satu khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan-Mu?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung, 2002), h.8.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah swt untuk melaksanakan segala yang di ridhoi-Nya.² Dengan demikian, manusia menjadi pemegang peranan penting bagi kehidupannya. Keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah manusia memiliki akal dan nafsu. Kedua hal inilah jika seorang manusia mampu mengendalikannya niscaya akan menuntun kepada jalan kebaikan dan begitupun sebaliknya akan membawa kepada jalan keburukan jika tidak mampu dikendalikan.

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.³ Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah⁴.

² Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum – Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, (Yogyakarta : Genta Press, 2015), h. 69.

³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 261.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 1.

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama. Apabila perilaku warga masyarakat menuruti norma atau kaidah maka perbuatannya dipandang normal atau wajar, dan apabila sebaliknya dianggap tidak normal atau menyimpang, sehingga akan menerima reaksi masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa apa yang diartikan dengan kaidah adalah patokan atau ukuran atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.⁵

Aturan-aturan mengenai baik-buruknya tindak manusia inilah selanjutnya disebut sebagai hukum, yang dimana para “Penegak Hukum” gunakan untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan. Hukum inilah juga digunakan sebagai pembatasan perilaku manusia dari tindakan-tindakan amoral seperti berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah melalui hukum pidana. Dalam penerapannya hukum pidana sendiri terbagi atas dua, yaitu hukum pidana

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 37.

materiil dan hukum pidana formil. Leden Marpaung di dalam bukunya mengutip penjelasan Mr. Tirtaamidjaja sebagai berikut.⁶

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara pelaksanaan keputusan hakim.”

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang apabila tidak dipatuhi akan diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan atau menjalankan hukum pidana materiil. Antara hukum materiil dan hukum formil ini bersinergitas demi tujuan mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil⁷ yakni kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana⁸ yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 atau dikenal dengan sebutan Kitab

⁶ Leden Marpaung, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 2-3.

⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Makassar : Kencana, 2014), h. 8.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP inilah kemudian dijadikan landasan hukum proses penyelesaian suatu perkara pidana di Pengadilan sejak awal hingga adanya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.

Salah satu tahap terpenting dari sebuah pemeriksaan perkara di Pengadilan adalah pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari bahasa belanda, *bewijs*⁹- diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, “pembuktian” diartikan sebagai suatu usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁰ Sementara itu, *membuktikan* berarti memperlihatkan bukti dan *pembuktian* diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.¹¹

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama.¹² Hampir semua pembuktian dalam perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, berbunyi:

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 217.

¹⁰ M Soesilo, *Kamus Hukum – Dictionary Of Law Complete Edition*, (Jakarta : Gama Press, 2009), h. 496.

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori Hukum dan Pembuktian*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012), h. 3.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 265.

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktek disebut dengan saksi mahkota. Beberapa tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan dan kasus narkoba menggunakan saksi mahkota oleh karena modus operandinya berkaitan dengan *deelneming* (penyertaan). Istilah saksi mahkota (SM) tidak dikenal dalam KUHAP, namun dalam praktik sangat sering digunakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/Pid.sus/2011 saksi mahkota didefinisikan sebagai “saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain putusan MA *a quo*, saksi mahkota juga disebut dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI (SEJA) No. B-69/E/02/1997 perihal pembuktian dalam Perkara Pidana yang antara lain menyatakan bahwa: “Dalam praktik saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim”.¹³

Di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan

¹³ Moh. Askin, *Peran Hakim Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota, Varia Peradilan* Nomor 346, September 2014, h. 16.

sebutan *splitsing* (pemisahan). Berpedoman pada Pasal 142 KUHP¹⁴ yang mengisyaratkan suatu perkara yang memuat sekaligus beberapa orang didalamnya maka haruslah dilakukan pemisahan berkas perkara.

Dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*” berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan.¹⁵ Terkait hal kedudukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana ditarik sebagai saksi dalam berkas perkara yang terpisah mengenai tindak pidana yang sama adalah melanggar hak terdakwa mengenai *non self incrimination*. Asas ini menyatakan bahwa tidak mungkinlah seorang terdakwa akan mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri dalam berkas perkara *splitsing*.

Disisi lain saksi mahkota dipandang memiliki daya potensial dalam mengungkap kebenaran suatu perkara pidana. Seperti pada kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu

¹⁵ Hukum Online.com, *Hak Untuk Mungkir*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4616/hak-untuk-mungkir>, pada tanggal 18 September 2016 pukul 11.57 WITA.

sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi maupun koneksi bisnis atau pun melalui perkumpulan profesi, seperti dalam tindak pidana narkoba. Dijadikannya terdakwa menjadi saksi yang disebut *saksi mahkota* itu, dalam praktik telah menimbulkan pro-kontra¹⁶.

Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan saksi mahkota didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka ataupun terdakwa yang membantu dalam mengungkap sebuah kejahatan serta memperoleh kebenaran materiil dengan memberikannya sebuah penghargaan atas kesaksiannya tersebut.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum saksi mahkota dalam praktek peradilan pidana Indonesia?

¹⁶ Moh. Askin, *Peran Hakim Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota, Varia Peradilan* Nomor 346, September 2014, h. 18.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya kepada terdakwa yang memberikan keterangan di muka pengadilan sebagai saksi atau dalam praktik disebut sebagai saksi mahkota.

Fokus pada penelitian ini adalah terkait saksi mahkota dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “tersangka” dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kata “terdakwa” disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Disebut terdakwa karena pada pemeriksaan sidang di pengadilan, orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan.¹⁷

Kata “alat bukti” adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

¹⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana – Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Press, 2013), h. 21.

Kata “saksi” dalam KUHAP berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kata “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Kata “pembuktian” menurut J.C.T. Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁸

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan dan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

M. Yahya Harahap dalam bukunya “**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali**”. Buku ini membahas tentang pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Buku ini juga membahas tentang alat bukti, pembuktian serta membahas secara eksplisit tentang alat bukti

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Aksara Baru, 1989), h. 135.

keterangan saksi, cara menilai kebenaran serta nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

Andi Hamzah dalam bukunya “**Hukum Acara Pidana Indonesia**”. Buku ini membahas tentang ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dalam buku ini juga membahas tentang alat-alat bukti, sistem dan teori-teori pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

Zulkarnain dalam bukunya “**Praktik Peradilan Pidana**”. Buku ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana. Sejak dimulainya pemeriksaan tahap awal di kepolisian sampai pemeriksaan di pengadilan. Didalam buku ini juga membahas mengenai pemeriksaan saksi dalam membuktikan benar atau tidaknya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di sebuah pengadilan. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

Rocky Marbun dalam bukunya “**Sistem Peradilan Pidana Indonesia**”. Buku beliau menjelaskan tentang teori-teori daripada sistem peradilan pidana serta model dari sistem peradilan pidana. Buku ini juga menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan

dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya **“Teori dan Hukum Pembuktian”**.

Buku ini membahas tentang teori-teori pembuktian, selain itu dibahas pula perihal alat-alat bukti termasuk pula barang bukti dalam hal ini salah satunya ialah keterangan saksi, cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian dan beban pembuktian atau bewijslast. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

J.C.T. Simorangkir, dkk., dalam bukunya yang berjudul **“Kamus Hukum”**. Buku beliau memberikan gambaran, pengetahuan serta penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang masih asing bagi masyarakat bahkan mahasiswa hukum. Hal ini berbeda dengan pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yang membahas secara terperinci mengenai saksi mahkota dan penerapannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Arah dan sasaran tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran saksi mahkota dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perumusan putusan terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pemahaman kita mengenai penggunaan keterangan saksi mahkota dalam suatu persidangan. Secara detail kegunaan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian hukum acara pidana selanjutnya, khususnya teori hukum pidana yang dapat memberikan pencerahan tentang absurdnya pemahaman orang-orang tentang penggunaan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu persidangan atau dalam hal ini saksi mahkota.

b. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini maka diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih praktis bagi legislator terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana yang sudah sampai pada tahap Program Legislasi Nasional (Prolegnas), agar kiranya “saksi mahkota” ini dituangkan dalam aturan yang ditata secara jelas saat Undang-undang *a quo* dilembagakan dalam lembaga negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah Sistem Peradilan Pidana diambil dari bahasa Inggris *Criminal Justice System*.¹ Jika kita melihat kepada unsur-unsur yang membuat sistem ini bekerja, maka akan dijelaskan tentang organisasi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kepengacaraan atau Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi jika kita melihat kepada proses bekerjanya sistem ini, maka perlu juga dijelaskan tentang tahap *pra-adjudikasi* dengan kewenangan kepolisian, kewenangan kejaksaan dan kewenangan advokat, tahap *ad-judikasi* dengan kewenangan peradilan, yaitu kewenangan pemeriksaan dakwaan dan pembelaan dipersidangan serta pemberian putusan dan penentuan saksi, serta kewenangan banding, kasasi, PK dan grasi, serta selanjutnya tahap *purna-ad-judikasi* yaitu kewenangan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro², bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini yakni usaha untuk mengendalikan

¹ Mardjono Reksodiputro, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", dalam *Demi Keadilan – Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana : Enam Dasawarsa Harkristuti Harkriswono*, (Jakarta : Kemang Studio Aksara, 2016), h. 299.

² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 18.

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Adapula menurut Indriyanto Seno Adji³, menyatakan tentang *Criminal Justice System* dan *Criminal Justice Administration*. Dimana *Criminal Justice System* adalah jalan prosedural dari suatu hukum acara pidana yaitu sejak adanya dakwaan sampai diucapkannya putusan bagi terdakwa. Sedangkan *Criminal Justice Administration* hanya merupakan bagian dari sub sistem peradilan. Berdasarkan paparan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana adalah tahapan prosedural atau mekanisme dalam penanganan perkara yang dimana dilaksanakan oleh badan-badan hukum yang berwenang sebagai proses penyelesaian suatu perkara pidana.

2. Tujuan dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro seperti yang telah dikutip oleh Rocky Marbun dalam bukunya bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci yakni sebagai berikut:⁴

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

³ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 20.

⁴ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 31.

- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Adapun menurut Loebby Loqman⁵, menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.

Sedangkan menurut Amrullah⁶, menjelaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan dipersidangan.

Demi mewujudkan terlaksananya tujuan sistem peradilan pidana disuatu negara terutama di Indonesia, tentu akan terwujud apabila didukung oleh subsistem atau komponen-komponen. Komponen-komponen ini kemudian wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan:⁷

- a) Kepolisian;
- b) Kejaksaan
- c) Pengadilan; dan
- d) Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 34.

⁶ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 34.

⁷ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 37.

Keempat instansi tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Dimana Kepolisian sebagai organ pemerintah setingkat dengan Kementerian atau instansi non-Kementerian dibawah Presiden. Kejaksaan mempunyai puncak kekuasaan pada Kejaksaan Agung, dimana Kejaksaan Agung merupakan organ pemerintah yang berada dibawah Presiden dan merupakan lembaga non-Kementerian. Dan Pengadilan berdiri mandiri secara fungsional tetapi diarahkan oleh Mahkamah Agung. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

3. Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Ada beberapa model yang melandasi sistem peradilan pidana. Menurut Rocky Marbun setidaknya-tidaknya ada 8 (delapan) model, yakni sebagai berikut:⁸

a) *Crime Control Model*

Sistem ini didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan dari model ini adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa yang dihukum.

⁸ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 49.

b) *Due Process Model*

Menurut sistem ini, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi. *Due Process Model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

c) *Family Model*

Family Model adalah suatu sistem peradilan pidana yang dipelopori oleh John Griffith. Menurut beliau, seorang petindak, harus di *treatment* (perlakuan) dengan kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

d) *Medical Model*

Pendekatan melalui *medical model* ini berawal dari ajaran Lombroso, yang menyatakan penjahat merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang menyimpang dan disebut orang yang sakit. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus menjadi terapi, sehingga pelaku kejahatan menjadi manusia yang normal.

e) *Justice Model*

Justice model ini diperkenalkan oleh Noval Morris, dengan pemikiran yang bertitik tolak pada mekanisme peradilan dan perubahan-perubahan penghukuman. Model ini melakukan re-evaluasi terhadap hasil-hasil dari administrasi peradilan pidana dan memberikan perhatian khusus

kepada sanksi pidana, moral dan *social cost* untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan atas masyarakat dari kejahatan.

f) *Bureaucratic Model*

Model ini menekankan pada setiap kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

g) *Just Deserts Model*

Teori pemidanaan *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum.

h) *Integrated Criminal Justice System Model*

Di Indonesia, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa Mardjono Reksodiputro lah yang pertama kali memperkenalkan dan memperluas konsep sistem peradilan pidana di Indonesia, begitu pula dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu, sebagai terjemahan dari *Integrated Criminal Justice System*. Mardjono Reksodiputro menghendaki adanya

pelaksanaan sistem peradilan yang terpadu diantara keempat komponen yang ada.⁹

Nilai-nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- 1) Menuntut adanya keselarasan hubungan antara sub-sistem secara administrasi;
- 2) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut;
- 3) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- 4) Menjaga hukum dan ketertiban.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

⁹ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 59.

- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep ‘integrasi’ itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup masalah substansi dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi.¹⁰ Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materil yang dikawal oleh norma peraturan perundang-undangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

B. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Didalam acara pemeriksaan perkara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membedakan tiga macam pemeriksaan, yakni:

1. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara *tolakkan vordering*, sebagaimana menurut A. Karim Nasution,¹¹ yaitu “perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan

¹⁰ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 61.

¹¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 312.

(dakwaan).” Perkara jenis ini menurut Istilah KUHAP disebut acara pemeriksaan biasa.

Dalam acara pemeriksaan biasa undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat. Namun pada prinsipnya proses acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses acara pemeriksaan biasa dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:¹²

- a) Proses pertama penyerahan berkas perkara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, bahwa pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan *c.q.* Hakim juga dengan disertai surat dakwaan agar perkara pidananya diajukan dalam persidangan untuk diperiksa dan diadili,
- b) Proses kedua yaitu sidang I, sebagaimana menurut Pasal 153 ayat (3), untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur (atau bisa karena alasan tertentu) sidang dinyatakan tertutup untuk umum);¹³ selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (1) KUHAP bahwa hakim ketua sidang menanyakan perihal identitas terdakwa serta mengingatkan terdakwa agar memperhatikan

¹² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 312.

¹³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana – Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Press, 2013) h.

segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan; setelah itu menurut Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP, hakim ketua sidang memina kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya; selanjutnya pada huruf b, bahwa hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan;

- c) Proses ketiga pada sidang II, setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya berhak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum;
- d) Proses keempat pada sidang III, adalah proses pembuktian. Proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 156 KUHAP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela, yakni menolak eksepsi atau keberatan terdakwa;
- e) Proses kelima pada sidang IV, adalah pembacaan tuntutan (*requisitoir*) oleh penuntut umum;
- f) Proses keenam, ketujuh dan kedelapan pada sidang V, VI, dan VII, adalah tanya jawab, yaitu pembacaan pleidooi oleh terdakwa atau penasehat hukum, pembacaan replik (*nader requisitoir*) oleh penuntut umum dan terakhir pembacaan duplik (*nader pleidooi*) oleh terdakwa atau penasehat hukum;

- g) Proses kesembilan pada sidang IX, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat, menurut A. Karim Nasution,¹⁴ yaitu perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai pembuktian dan penggunaan undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara 1 (satu) tahun. Maka dari itu pemeriksaan perkara ini tidak memerlukan persidangan yang memerlukan waktu yang lama.¹⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa, juga berlaku bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain. Adapun secara singkat akan diuraikan proses pemeriksaan singkat sebagai berikut:

- a) (1) penuntut umum dengan segera setelah terdakwa dipersidangan menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberikan secara lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

¹⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 314.

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 396.

(2) pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;

- b) Apabila hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, agar diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan kepersidangan pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa;
- c) Untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f) Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa.

Demikian pula menurut Pasal 204 KUHAP, bahwa jika dari pemeriksaan persidangan suatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan dengan pemeriksaan tersebut.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Menurut ketentuan KUHAP, bahwa pemeriksaan cepat dibagi atas dua bagian, yaitu (1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan (2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk lebih jelasnya tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, diuraikan sebagai berikut:¹⁶

a) Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan

Yang dimaksud dengan perkara ringan sebagaimana menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, bahwa perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Adapun tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur menurut KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP, bahwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa kepersidangan. Selanjutnya ayat (3) KUHAP, bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding;

¹⁶Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 317.

- 2) Dalam perkara ini tidak dibuat surat dakwaan ke pengadilan, jadi cukup panitera hanya mencatat dalam register yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan. Berita acara dalam tindak pidana ringan tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata hanya ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik;
- 3) Menurut Pasal 206 KUHAP, bahwa pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;
- 4) Menurut Pasal 207 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap kepersidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik. Selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan dan perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Kemudian pada ayat (2) hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya;
- 5) Menurut Pasal 208 KUHAP, bahwa saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu;
- 6) Menurut Pasal 209 KUHAP, bahwa putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera

dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.

b) Acara Pemeriksaan Cepat Pelanggaran Lalu Lintas

Perkara yang diperiksa menurut cara ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

C. Teori dan Sistem Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Dengan demikian, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁷

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 273.

Dalam hukum acara pidana, sistem pembuktian tidak hanya terjadi dalam mengadili pokok perkara saja, tetapi juga mengadili tuduhan perbuatan dari petindak atas ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ada empat hal yang relevan terkait konsep pembuktian:¹⁸

Pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. **Kedua**, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. **Ketiga**, hal yang disebut sebagai *exclusionary rules*. Dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *exclusionary discretion*. Phyllis B. Gerstenfeld memberi definisi *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum. **Keempat**, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.

2. Teori Sistem Pembuktian dan Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012), h. 10 .

tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

Salah satu negara di dunia yang menggunakan *conviction intime* dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *unus judex* atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan jurisdiktorlah yang menentukan.¹⁹ Kendatipun demikian, hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang paling ekstrem, seandainya semua juri mengatakan terdakwa bersalah, namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat menjatuhkan pidana.

b) *Conviction-Raisonee*

Sistem pembuktian ini mirip dengan *conviction-in time* yang menggunakan keyakinan hakim sebagai dasar pembuatan putusan suatu perkara. Namun bedanya, dalam *conviction raisonee* faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang

¹⁹ Jumlah juri dalam pengadilan Amerika berkisar antara 11 sampai dengan 15 juri, kecuali untuk kasus serius, dalam pengertian melibatkan pejabat negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh *grand juri* yang terdiri dari 23 orang. Selama persidangan, para juri diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar, seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para anggota juri tinggal di hotel dan hanya memiliki akses ke berita-berita yang telah disensor. Isolasi para juri dalam persidangan suatu perkara dikenal dengan istilah *sequestration*.

jelas.²⁰ Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonne* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*.²¹ Menurut sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 277.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 278.

dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

Positief wettelijk bewijstheorie ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal. Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif atau

Negatief Wettelijk Bewijstheorie

Sistem pembuktian yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*. Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*.²²

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Sistem ini menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dari penggabungan kedua sistem yang saling

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 278.

bertolak belakang tersebut terciptalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam sistem ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu dari unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

D. Alat Bukti

1. Alat Bukti yang Sah Menurut Undang-Undang

Menurut R. Atang Ranomiharjo,²³ bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Alat bukti yang mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian

²³ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Makassar : Kencana, 2014), h. 231.

dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selain saksi, ahli, dokumen atau surat, dan lain yang termasuk alat bukti sah, bukti selebihnya disebut dengan *real evidence* atau *physical evidence*.²⁴ *Real evidence* atau *physical evidence* merupakan bukti yang cukup signifikan dalam persidangan perkara pidana, namun tidak berarti dalam perkara perdata tidak digunakan. Misalnya untuk menentukan status keabsahan orang tua terhadap anaknya dalam pengertian mencari orang tua biologis seorang anak, diperlukan tes DNA. Hasil tes tersebut merupakan *real evidence*. Dalam konteks perkara pidana, secara singkat *physical evidence* diartikan sebagai hal-hal yang diakui sebagai alat bukti oleh penuntut umum dengan tujuan memberatkan terdakwa atau oleh penasihat hukum dengan tujuan meringankan terdakwa.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Penerbit Erlangga, 2012), h. 74.

Dapat dikatakan bahwa *physical evidence* atau *real evidence* adalah *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung. Bukti ini harus diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lain. Dalam konteks hukum pembuktian, menurut Joshua Dressler²⁵ hal ini dikenal dengan istilah *corroborating evidence* yang secara harfiah berarti barang bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum dipertimbangkan hakim.

2. Keterangan Saksi

Oleh karena penulisan skripsi ini dibatasi oleh rumusan masalah dalam hal ini membahas tentang saksi, terkhusus kepada status saksi yang berkedudukan pula sebagai terdakwa dalam suatu persidangan. Maka Penulis hanya membahas salah satu dari 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) tentukan, yakni “keterangan saksi”. Ini juga kemudian akan dijadikan pondasi dasar oleh penulis untuk membahas spesifik mengenai “saksi mahkota” yang pada esensinya menjadi tema dasar skripsi ini.

a. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Erlangga, 2012), h. 74.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a) dilakukan menurut cara agamanya masing-masing;
- b) lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a) dapat dikenakan sandera;
 - b) penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang;
 - c) penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari
- (Pasal 161)

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- a) yang saksi lihat sendiri;
- b) saksi dengar sendiri;
- c) dan saksi alami sendiri;
- d) serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

- a) setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
- b) “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi dipersidangan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti,
- c) “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan

saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa : “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”.

3) Keterangan saksi harus diberikan didalam sidang

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” dipersidangan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan “*outside the court*” bukan alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa”. Dalam perkara ini ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan.

b. Cara menilai Kebenaran Keterangan Saksi

Menurut M. Yahya Harahap,²⁶ untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 290.

1) Persesuaian antara keterangan saksi

Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis.

2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti tersebut.

3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu

Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya saksi menerangkan, bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Akan tetapi, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan terdakwa. Dalam contoh ini, saksi memberikan keterangan dengan suatu pernyataan keadaan yang kurang pasti. Tentu ada sebab dan alasannya kenapa saksi

memberikan keterangan tentang suatu keadaan diri terdakwa yang tidak pasti. Untuk itu hakim berperan menggali alasan saksi.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”.

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

a) Karena saksi menolak bersumpah,

Kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keterangan hakim”.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini sebagaimana Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan dalam sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan.

c) Karena hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jadi, seandainya penuntut umum tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan “tanpa sumpah”.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah”, di sidang pengadilan.

Namun untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” hakim atau sebagai “petunjuk”, harus dibarengi dengan syarat:

a) harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah

misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa;

b) alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

c) kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian.

2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

Bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni:

- a) saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- b) keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti;
- c) keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan di luar persidangan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- d) keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183.

Saksi merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya namun juga keterangan dari beberapa saksi (*unus testis nullus testis*). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau

keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi dalam hal ini posisi alat bukti saksi merupakan penentu berjalannya sidang pengadilan.

E. Tentang Saksi Mahkota

1. Pengertian Saksi Mahkota

Saksi mahkota, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi '*crown witness*', mempunyai banyak istilah di banyak negara. Di Belanda disebut dengan '*kroongetuige*', di Jerman disebut dengan '*staatszeugen*' atau '*kronzeuge*', di Italia dahulu disebut dengan '*pentiti*' atau '*pentito*' dan kemudian menjadi '*collaborate della giustizia*'. Di Inggris dan Irlandia Utara, dikenal dengan sebutan '*supergrass*', di Prancis menyebut saksi demikian dengan sebutan '*repenti*', di Belgia dengan '*spijtoptant*', di Spanyol dengan sebutan '*arrenpenditos*' dan di Amerika Serikat disebut dengan banyak istilah seperti '*informant witness*', '*accomplice evidence*', '*corroborative evidence*', '*crown witness*', '*justice collaborator*', '*state witness*'.²⁷

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah 'Saksi Mahkota', namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal

²⁷ Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta : Tesis, Program Pascasarjana Strata Dua Universitas Indonesia, 2011), h. 50.

dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.

Adapun yang dimaksud dengan saksi mahkota menurut pakar hukum yakni:

a) M. Yahya Harahap:²⁸

“saksi mahkota adalah saksi yang merupakan terdakwa pada kasus yang sama di pengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangananya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal-balik, dimana berkas perkara harus di pisah (di-split).”

b) Andi Hamzah:²⁹

“saksi mahkota adalah salah seorang terdakwa dijadikan menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan.”

c) R. Soesilo:³⁰

“saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa /salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.”

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 321.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 162.

³⁰ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan* (Bogor : Politera, 1980), h. 7.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pakar hukum tersebut dapatlah ditemukan benang merah bahwa saksi mahkota yakni tersangka atau terdakwa yang dalam hal ini sekaligus menjadi saksi dalam sidang perkara pidana. Tujuannya itu untuk menggali kebenaran suatu perkara, maka dari itu penuntut umum melakukan kesepakatan bersama tersangka atau terdakwa bahwa jika bersedia melakukan kesaksian maka akan diberikan kompensasi berupa peniadaan atas penuntutan atau setidaknya mendapatkan pengurangan tuntutan hukuman oleh penuntut umum.

2. Pro-Kontra Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedangkan apabila mereka digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Itulah mengapa pengajuan saksi mahkota didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu saja, yakni dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat

bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini juga tentunya agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Secara normatif, pengajuan dan pemakaian saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Namun perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan saksi mahkota bukanlah suatu yang dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Memberikan penghargaan terhadap saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkap perkara pidana merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi dalam mewujudkan hukum yang adil (*due process of law*) yang penerapannya tidak sekadar penerapan hukum formil. Adapun penghargaan yang dapat diberikan adalah keringanan tuntutan, penghapusan tuntutan dan pemberian remisi atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana yang merupakan beberapa kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, termasuk tugas pokok dan wewenang Kejaksaan.

F. Saksi dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sebagai aturan dalam masyarakat, menjelaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan dan menimbulkan bahaya baik jiwa, harta, akal, keturunan maupun kehormatan orang lain dan diri sendiri dipandang sebagai kejahatan. Di mana setiap kejahatan tersebut ada sanksi hukumnya, sesuai dengan jenis dan sifatnya. Aturan tersebut dapat diketahui melalui nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta ijtihad para mujtahid.

Hukum Pidana Islam atau *jarimah*, adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Artinya, istilah ini mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, biasanya perbuatan tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.³¹

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah*³² mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Dikalangan Fuqaha', perkataan *jinayah*

³¹ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h.1.

³² Menurut aliran (mazhab) Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian *jinayah*. Kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang atau harta benda, dinamakan *ghasab*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pencurian dipisahkan dari pembahasan *jinayah*, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Jadi, pembahasan tentang *jinayah* dikhususkan bagi kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab tersendiri. Adapun aliran atau mazhab lain, seperti aliran Asy-Syafi'i, Maliki, dan Ibnu Hambal, tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian terhadap harta benda lainnya). Oleh karena itu, pembahasan keduanya (kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda) diperoleh dalam *jinayah*. Lihat <http://e-journalfh.blogspot.com/2013/03/jinayah-jarimah.html>.

berarti perbuatan yang terlarang menurut syara'.³³ Tujuan disyari'atkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti: pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya.³⁴

2. Saksi dalam Hukum Islam

Perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat, diberikan sanksi pidana dalam rangka mewujudkan keadilan. Dalam hal ini hakim sebagai penentu dalam memutus perkara pidana harus melihat alat bukti yang berkaitan dengan penyelesaian suatu tindak pidana. Karena dengan adanya alat bukti, kejelasan dan kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Paradigma alat bukti dalam kajian hukum Islam senantiasa mendapat perhatian serius, hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan maqashid syari'at, walaupun terkadang masih terdapat perbedaan pendapat dalam kepastian hukum terhadap beberapa tindakan kejahatan.

Penggunaan saksi dalam suatu proses penyelesaian perkara kejahatan adalah dua orang laki-laki yang memang benar-benar

³³ Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telaah Konsep Hudud)*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.2.

³⁴ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h.2.

mengetahui kejadian tersebut. Dengan adanya saksi akan terwujud kepastian hukum terhadap akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sehingga akan terwujud kemaslahatan hidup manusia yang sesuai dengan tujuan dari hukum Islam.

Keberadaan saksi dalam suatu tindakan yang terkait dengan suatu perbuatan pidana sangat penting dan utama. Kesaksian menurut mayoritas ulama disebut dengan Syahadat. Syahadat sangat penting dalam menetapkan hak atas diri orang lain, karena mengandung pemberitaan yang pasti, baik itu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.

Saksi dalam mengungkap suatu perkara pidana sangat menentukan sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti saksi akan terwujud suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kesaksian merupakan suatu metode yang sangat penting terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang, agar ditetapkan sanksi hukum bagi pelaku tindakan kejahatan.

Pembuktian dengan menggunakan saksi terhadap tindak pidana dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan antara *jarimah* yang hukumannya badaniyah, seperti qishash, dera dan lain-lain dengan jarimah

yang hukumannya maliah, seperti diat atau ganti rugi. Berikut penjelasan dari jarimah yang hukumannya badaniyah dan maliah:³⁵

a. Jarimah yang Hukumannya *Badaniyah*

Jarimah yang hukumannya badaniah adakalanya qishash dan adakalanya ta'zir. Untuk jarimah yang hukumannya qishash, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban. Ketentuan ini berlaku baik dalam qishahs jiwa maupun bukan jiwa, kecuali pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik pembuktian dengan dua orang saksi laki-laki hanya berlaku dalam qishahs atas jiwa saja. Adapun untuk qishash atas bukan jiwa, pembuktiannya bisa dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban.

Untuk jarimah yang hukumannya ta'zir badaniyah bersama-sama dengan qishash maka pembuktiannya sama dengan jarimah yang mewajibkan hukuman qishash. Adapun jarimah yang mewajibkan hukuman ta'zir badaniah tanpa qishash maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktiannya sama dengan jarimah yang hukumannya qishash, yaitu harus dengan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini karena hukuman badan itu merupakan hukuman yang cukup mengkhawatirkan, sehingga pembuktiannya harus hati-hati. Sedangkan menurut Imam Malik, untuk pembuktian jarimah qishash selain jiwa bisa

³⁵ Joni Zulhendra, *Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam* (Padang : Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2010), h. 18.

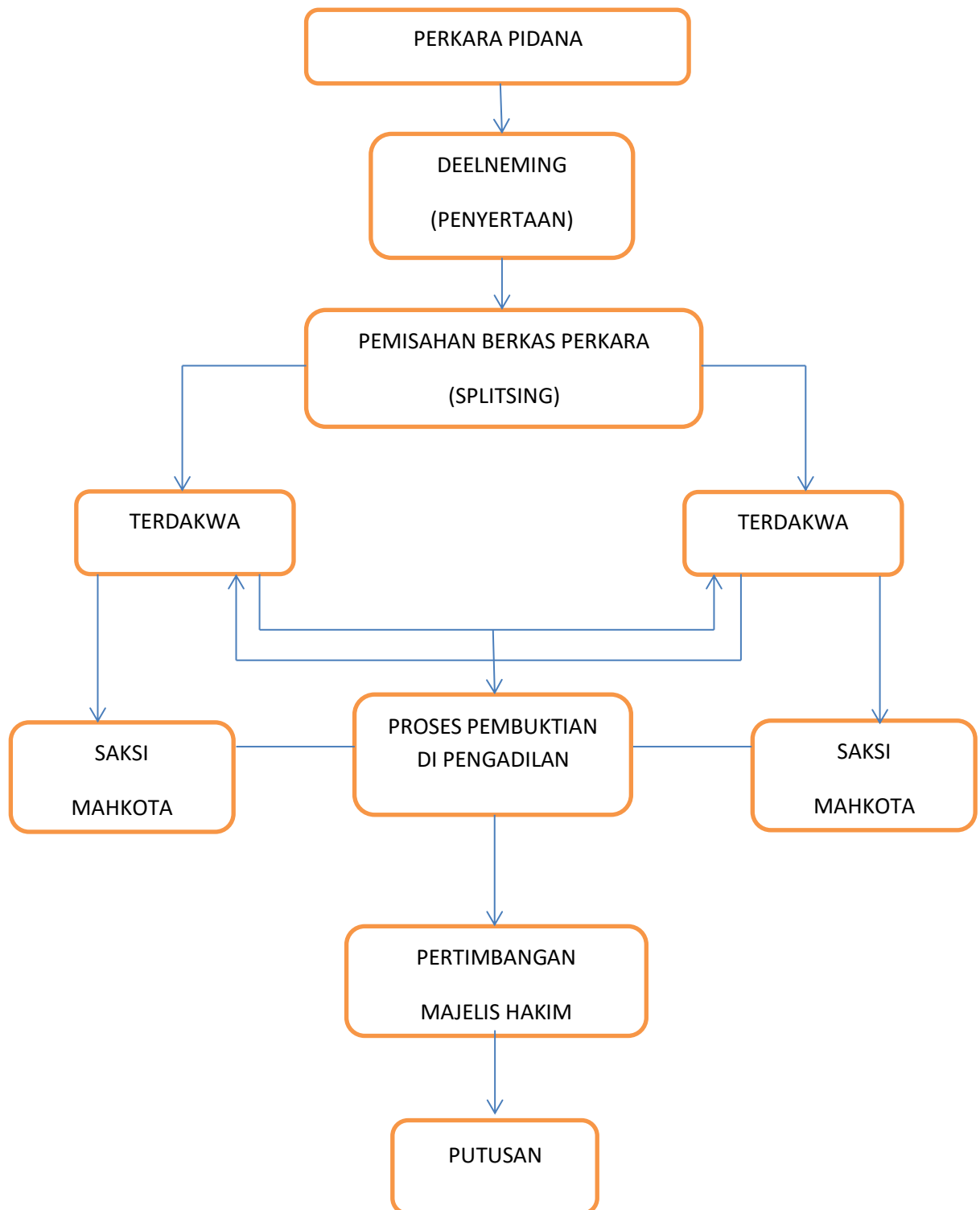
dengan seorang saksi laki-laki dan sumpahnya korban dan hukuman yang dijatuhkan di samping qishash ditambah dengan hukuman ta'zir. Menurut Imam Abu Hanifah, untuk membuktikan jarimah yang hukumannya ta'zir bisa digunakan dua saksi laki-laki yang salah satunya adalah korban atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

b. Jarimah yang Hukumannya *Maliah*

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah, seperti diat atau ganti rugi bisa dengan dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki dan sumpahnya korban. Sementara Malikiah membolehkan pembuktian untuk jarimah yang hukumannya maliah dengan saksi dua orang wanita ditambah dengan sumpah korban. Alasannya adalah bahwa dua orang wanita dapat menggantikan seorang lakilaki dalam kedudukannya sebagai saksi dalam masalah harta benda. Karena itu dalam hukuman maliah dua orang perempuan juga bisa digunakan sebagai saksi untuk pembuktian tindak pidananya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, untuk pembuktian tindak pidana yang hukumannya maliah dapat digunakan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa tindak pidana yang hukumannya maliah dapat dibuktikan dengan seorang saksi tanpa diperkuat dengan sumpah, apabila hakim mempercayai dan meyakini keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Apabila hakim tidak

meyakini keterangan saksi karena keterangannya meragukan maka hakim dapat menolaknya. Kunci untuk diterimanya kesaksian adalah keyakinan hakim. Apabila keterangan para saksi tidak seragam atau bahkan bertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut. Hakim dalam proses pengadilan di Indonesia saksi yang digunakan adalah minimal dua orang saksi, jika tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi ada bentuk saksi lain yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana oleh hakim di pengadilan, yaitu saksi mahkota. Dalam hukum Islam sesuatu perbuatan yang dilarang jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang.

G. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Bantaeng. Difokuskan ke Pengadilan Negeri Bantaeng, Jalan Andi Mannapiang No. 15, Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Adapun alasan memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian yakni adanya putusan pengadilan yang terkait atau berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok

permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan:
 - a. Bahan hukum primer, berupa:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 93.

- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011.
 - 8) Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor : B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa Ensiklopedi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti yaitu dokumen putusan.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

disusun terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi.² Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang putusan pengadilan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam dan kamera. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet III ; Jakarta : UI-Press, 1986), h. 232.

ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

- b. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan topik yang tengah diteliti.

Analisis kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian bagaimana penyelesaian sengketa analisis hukum tentang penggunaan saksi mahkota serta pertimbangan hakim akan keberadaannya. Selanjutnya kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana

1. Landasan Hukum Penerapan Saksi Mahkota

Menurut hukum, bahwa yang disebut dengan saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.

Hukum Acara Pidana memang tidak membahas secara langsung mengenai saksi mahkota.¹ Saksi mahkota yang kedudukannya merupakan saksi yang meringankan terdakwa untuk dirinya sendiri dan memberatkan untuk terdakwa asal. Artinya terdakwa kedua yang dalam hal ini yang dijadikan sebagai saksi mahkota mendapatkan keuntungan keringanan hukuman atas persaksian yang diberikannya.

Saksi yang memberatkan atau biasa disebut saksi *a charge* adalah saksi yang dipilih oleh Penuntut Umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Dan adapun saksi yang meringankan atau biasa disebut saksi *a de charge* yakni saksi yang dipilih oleh Penuntut Umum,

¹ Nasrul Kadir, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

terdakwa atau Penasehat Hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.² Demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa “dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut”

Penggunaan saksi mahkota dalam menyelesaikan perkara pidana dapat diberlakukan, karena alat bukti saksi minimal yang digunakan adalah dua orang saksi. Oleh karena itu saksi mahkota menjadi saksi terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sebagaimana dinyatakan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, bahwa “munculnya saksi mahkota ini disebabkan karena para saksi adalah para terdakwa dalam beberapa perkara yang dipisah-pisah dengan dakwaan yang sama. Dalam kejahatan yang terorganisasi, sering terjadi kekurangan alat bukti berupa saksi di Pengadilan. Maka penggunaan saksi mahkota menjadi alternatif dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana seperti; pencurian, pembunuhan, narkoba dan lain sebagainya. Saksi mahkota juga dapat dikatakan sebagai terdakwa yang dijadikan saksi, dan sebaliknya saksi dijadikan terdakwa dalam beberapa berkas perkara yang dipisahkan satu sama lain, atau adanya para

² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 243.

saksi yang juga adalah terdakwa dalam beberapa perkara yang dipisah-pisahkan dengan dakwaan yang sama.”³

Oleh karena perkembangan hukum dewasa ini memang belum ada perundang-undangan yang secara tegas menyatakan akan keberadaan saksi mahkota. Namun dalam praktek peradilan pidana, istilah saksi mahkota bukanlah istilah asing bagi para penegak hukum.⁴ Meskipun demikian, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan apa yang disebut dengan saksi mahkota secara eksplisit, akan tetapi dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi itu sendiri telah menyebutkan isyarat akan keberadaan saksi mahkota, antara lain:

1. Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011 Tentang Justice Collaborator;
4. Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana;

Dalam Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³ Nasrul Kadir, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

⁴ Moh. Bakti Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 6 Januari 2017.

menerangkan bahwa saksi, korban, saksi pelaku (saksi mahkota) atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya. Hal ini berarti bahwa kategori orang-orang yang telah disebutkan mendapatkan imunitas dalam hal ini saksi mahkota itu sendiri. Namun hal ini tidak menjamin bahwa saksi mahkota itu bebas dari tuntutan hukum yang mengarah kepadanya. Apabila saksi mahkota ini pada putusannya hakim menimbang bahwa ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka akan tetap dihukum.⁵

Putusan Mahkamah Agung No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang mengatakan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dalam yurisprudensi ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa atau Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian serta ditekankan bahwa definisi saksi mahkota adalah, teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang Justice Collaborator yang dimana didalamnya terdapat pembahasan mengenai *plea bargaining* yaitu perlakuan bagi saksi pelaku dengan mempertimbangkan pengurangan hukuman bagi mereka yang bersedia bekerjasama mengungkap kebenaran dari suatu perkara

⁵ Zamzam, Pengacara, wawancara oleh penulis di Komp. Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yang dimana salah satu didalam dijelaskan tentang penggunaan saksi mahkota. Adapun dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Pada fakta yang ditemukan dilapangan dalam hal ini pada praktek peradilan pidana, penerapan saksi mahkota pada Pengadilan Negeri Bantaeng sering terjadi bahkan pada beberapa kasus terjadi memang mengharuskan dihadapkannya seorang saksi mahkota kedalam suatu persidangan dan seyogyanya sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan kasus-kasus pidana yang terjadi. Hal ini karena penerapan saksi mahkota dianggap sebagai metode atau strategi untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu perkara yang tengah dihadapi.⁶

2. Syarat-Syarat Diajukannya Saksi Mahkota

Sederhananya saksi mahkota ialah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang bersaksi kepada pelaku tindak pidana lain. Dalam proses pemeriksaannya dipengadilan seorang pelaku tindak pidana ini memberikan keterangan sebagai saksi mengenai perkara yang bersama terdakwa ia lakukan. Begitupun sebaliknya terdakwa ini juga kemudian akan memberikan keterangan pula kepada saksi (terdakwa) juga dalam pemeriksaan perkaranya. Jadi diantara mereka saling memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang mereka lakukan bersama

⁶ Najmawati, Pengacara, wawancara oleh penulis di Komp. Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasayya, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

secara timbal-balik, dalam hal ini sekalipun dalam pemeriksaan berkas yang terpisah.

Saksi mahkota dalam peradilan pidana juga tidak serta-merta dihadirkan begitu saja untuk memberikan keterangannya dipersidangan. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diadikannya seorang saksi mahkota, yakni sebagai berikut:⁷

- a) Antara kedua terdakwa merupakan perkara yang sama;

Seorang terdakwa yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota haruslah bersangkutan-paut dengan perkara seorang terdakwa yang akan diberikan keterangan didalam persidangannya, dengan kata lain jika ingin menggunakan saksi mahkota dalam suatu persidangan haruslah dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan (*deelneming*).

Adapun klasifikasi jenis penyertaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:⁸

- (1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat pidana (*mededader*), adalah mereka; yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yang turut

⁷ Nasrul Kadir, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 – Percobaan dan Penyertaan*, (Cet. V ; Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 81 - 82.

serta melakukan (*mede plegen*), dan yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*).

(2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu pembuat pidana (*medeplichtige*), yang dibedakan menjadi; pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

b) Telah dilakukan pemecahan/pemisahan perkara (*splitsing*);

Kewenangan Penuntut Umum untuk pemecahan berkas perkara diatur dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP yakni dimana Penuntut Umum diperbolehkan melakukan pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara. Pemecahan berkas perkara ini disebut *splitsing*. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*.⁹

Maka dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal-balik. Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan dalam satu pemeriksaan dipersidangan, antara satu dan yang lain tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi yang timbal-balik.

c) Dalam keadaan alat bukti lain yang tidak ada atau kekurangan alat bukti;

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 442.

Keadaan mendesak seperti tidak adanya alat bukti atau kekurangan alat bukti dalam suatu perkara menyebabkan Penuntut Umum harus “memutar otak” agar bagaimana perkara tersebut dapat menjadi sah dan layak untuk dipersidangkan dalam Pengadilan. Maka dari itu pemecahan berkas perkara dilakukan oleh Penuntut Umum, menyebabkan terpenuhinya unsur bukti dalam perkara. Saksi Mahkota dapat dihadirkan dipersidangan melalui mekanisme *splitsing* akan sangat membantu para penegak hukum dalam hal ini Hakim untuk melaksanakan tugasnya memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.

- d) Bersedianya seorang terdakwa untuk bersaksi kepada terdakwa yang lain;

Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara yaitu ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, yaitu ikut mengambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.¹⁰ Bertitik tolak dari pemikiran tersebut menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang. Hal ini berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 168.

Saksi mahkota dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi. Tentunya sebelum hal tersebut dilakukan terlebih dahulu Penuntut Umum meminta kesediaan si Terdakwa satu untuk bersaksi pada persidangan Terdakwa yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghormati hak-hak Terdakwa yang dimana antara lain:¹¹

1. Hak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP);
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 butir b);
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 53);
5. Hak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 dan Pasal 55);
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi terdakwa yang ancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

¹¹ Rahman Syamsuddin, Mata Kuliah, *Hukum Acara Pidana – Hak-hak Tersangka dan Hak-hak Terdakwa*, pada Senin, 27 April 2015.

lima tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan (2));

7. Hak menghubungi penasihat hukumnya;
8. Hak terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan (Pasal 57 ayat (2));
9. Hak untuk menghubungi dokter bagi terdakwa yang ditahan (Pasal 58);
10. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas. (Pasal 59 dan Pasal 60);
11. Hak untuk di kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
12. Hak terdakwa untuk berhubungan surat-meyurat kepada penasihat hukumnya (Pasal 62);
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63);

14. hak terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
15. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65);
16. Hak agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
17. Hak untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan Peninjauan kembali (Pasal 67, Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1));
18. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1));
19. Hak mengajukan keberataan tantang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1)).

Dalam hal ini Penuntut Umum harus menghormati segala hak-hak Terdakwa sehingga tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat merugikan pihak Terdakwa. Seperti yang tertera dalam Poin ke 16 diatas, Berdasarkan Pasal 66 KUHAP, bahwa seorang Terdakwa tidak diberikan beban pembuktian. Apabila seorang Terdakwa menyetujui permintaan Penuntut Umum untuk bersaksi pada persidangan teman Terdakwanya, maka keterangan yang disampaikan Terdakwa itu sebagai saksi bukan untuk memberatkan dirinya, tetapi ia hanya mengungkapkan berdasarkan apa yang ia

dengar, ia lihat dan ia alami sesuai dengan pengetahuannya sebagai saksi.

Penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam pemeriksaan perkara yang telah dilakukan pemisahan perkara pidana didalamnya, keterangan yang diberikan oleh masing-masing pelaku, berupa keterangannya sebagai saksi bukan untuk mengakui perbuatannya.¹² Keterangan yang diberikan berguna untuk pembuktian suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keterangan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya pada saat menjadi terdakwa nantinya.

3. Saksi Mahkota Pada Pemeriksaan Tingkat Pengadilan

Keberadaan saksi mahkota seringkali dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa.¹³ Padahal perlu diketahui bahwa para penegak hukum terkhusus kepada Hakim selalu memijakkan pendirian pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam setiap perkara, yakni terdakwa yang diperiksa wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah.

¹² Moh. Bakti Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 6 Januari 2017.

¹³ Amrullah, *Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*, dalam <http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf>, diunduh Jumat, 21 Oktober 2016, h.97

Penggunaan saksi mahkota dalam hukum acara menjadi alternatif bagi hakim sebagai alat bukti saksi dalam mengungkap dan memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam KUHAP sendiri tidak ada indikasi pelarangan atas penggunaan saksi mahkota. Pasal 142 KUHAP menjadi alasan penggunaan saksi mahkota bagi hakim dipersidangan untuk memeriksa masing-masing terdakwa secara terpisah

Pada proses peradilan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di depan penyidik dan hakim haruslah benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang pada dasarnya telah menyalahi aturan KUHAP. Penerapan dari saksi mahkota ini menjadi sangat penting apabila penegak hukum memfokuskan pada kepentingan perlindungan hak-hak si terdakwa. Namun bagi para penegak hukum sebenarnya penerapan saksi mahkota bukanlah suatu pelanggaran HAM.¹⁴

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota

1. Tentang Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkotika)

Penulis melampirkan putusan yang telah diperoleh dari lokasi penelitian (Pengadilan Negeri Bantaeng). Adapun perkara ini yakni kasus narkotika yang dimana sebenarnya adalah satu kesatuan perkara. Akan tetapi pada tahap Penuntutan di Kejaksaan perkaranya telah di pisah sesuai amanat Pasal 142 KUHAP. Untuk lebih mudah memahami maka perkara ini maka penulis melampirkan tabel sebagai berikut:

¹⁴ Amrullah, *Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*, dalam <http://oaji.net/articles/2014/745-1402168122.pdf>, diunduh Jumat, 21 Oktober 2016, h.97

Tabel 1.1. Perkara yang berkaitan dengan saksi mahkota pada PN. Bantaeng.

No	Kualifikasi	PUTUSAN No.91/Pid.Sus/2016/ PN.Ban.	PUTUSAN No.90/Pid.Sus/2016/ PN.Ban.	PUTUSAN No.89/Pid.Sus/2016/ PN.Ban.
1.	Terpidana	RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin. H. HAKIM	MUH. LUKMAN Alias LUKMAN Bin. H. AMBO	ISMAIL Alias MAE Bin. H. AMANG
2.	Dakwaan	Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

		Keempat: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Keempat: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Keempat: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3.	Putusan	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Gol. 1” (Dakwaan Kesatu	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Gol. 1” (Dakwaan Kesatu	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Gol. 1” (Dakwaan Kesatu

		<p>Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan).</p>	<p>Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan).</p>
--	--	--	--	---

a. Duduk Perkara

Berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng, melakukan penangkapan Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad, wanita pengguna narkotika jenis shabu-shabu. Dimana Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad mengakui bahwa ia memperoleh barang tersebut dari Ismail Alias Mae Bin H. Amang. Selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun yang bersangkutan tidak berada dirumah, dengan informasi bahwa dia biasa berada di kediaman Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim. Lalu Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng melakukan penggerebekan di rumah milik Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah secara bersamaan. Selanjutnya Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim, Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo beserta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

b. Dakwaan

Dakwaan dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban merupakan dakwaan yang berbentuk kumulatif yang dimana akan dilampirkan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama-sama saksi ISMAIL Alias MAE Bin H. AMANG, saksi MUH. LUKMAN Bin H. AMBO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, bertempat di kamoung Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. 1 bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal ketika saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM, bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng, melakukan penangkapan terhadap saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd, Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin. H. Amang selanjutnya saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, bergerak menuju rumah saksi Ismail Alias Mae Bin. H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse

Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Ismail Alias Mae Bin. H. Amang dan saksi Muh. Lukman Alias Lukman Bin. H. Ambo berada di rumah terdakwa yang telah sepakat menjual Narkotika jenis shabu-shabu, lalu sekitar jam 02.40 WITA saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM, bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa yang terletak di kampung Sasayya Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik terdakwa, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah terdakwa, saksi melihat lampu ruang depan rumah terdakwa bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh terdakwa, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 WITA saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang sementara melangkah menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang naik keatas rumah sedangkan Anggota

lainnya langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar milik terdakwa yang didampingi langsung oleh terdakwa sedangkan, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi dibalik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun kebawah dan duduk didepan kamar terdakwa, pada saat saksi dikamar terdakwa berhasil melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil berwarna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar plastik kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Rajamuddin, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merek Oppo warna putih, 1 (satu) handphone Nokia warna hitam milik Lukman, kemudian saksi sekitar jam 05.30 Wita saksi berhasil menemukan plastik bening dalam lubang pembuangan air dalam kamar mandi yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan disaksikan oleh terdakwa pada saat plastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air dalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) plastik ukuran besar bersama 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram, dua sachet kecil Kristal

bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan diatas meja didepan kamar terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri terdakwa dan orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekirman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- 3) 1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;
- 4) 2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

Yang terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan 1 dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama-sama saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2016, bertempat dikampung Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Gol 1 bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal ketika saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, melakukan penangkapan terhadap Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang selanjutnya Saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, bergerak menuju rumah saksi

Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi, kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo berada di rumah terdakwa yang telah sepakat menjual Narkotika jenis shabu-shabu, lalu sekitar pukul 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM, bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa yang terletak dikampung Sasayya Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu samping rumah milik terdakwa, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah terdakwa, saksi melihat lampu rumah depan rumah terdakwa bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh terdakwa, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 Wita saksi bersama Tim berhasil mendobrak pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang sementara melangkah menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi

bersama tim mengejar saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang naik keatas rumah sedangkan anggota lainnya langsung mengamankan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi dibalik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun kebawah dan duduk didepan kamar terdakwa berhasil melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa menemukan 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar plastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam milik Lukman, kemudian saksi sekitar pukul 05.30 Wita berhasil menemukan plastik bening dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi yang ada pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan disaksikan oleh terdakwa pada saat plastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik kosong ukuran besar bersama 1 (satu) sachet besar berisi shabu-shabu berat netto 0,3910 gram, 2 (dua) sachet kecil

Kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan dimeja didepan kamar terdakwa dan disaksikan oleh Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri terdakwa dan orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekirman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- 3) 1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;
- 4) 2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

Yang terdaftardalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan 1 dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama-sama saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2016, bertempat dikampung Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Gol 1 bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal ketika saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, melakukan penangkapan terhadap Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang selanjutnya Saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, bergerak menuju rumah saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, namun saksi tidak ada di rumah saksi,

kemudian saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng melanjutkan pengembangan ke rumah terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM dan menemukan Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo berada dirumah terdakwa yang telah sepakat menjual Narkotika jenis shabu-shabu, lalu sekitar pukul 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM, bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa yang terletak dikampung Sasayya Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu samping rumah milik terdakwa, pada saat saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, meloncat pagar rumah terdakwa, saksi melihat lampu rumah depan rumah terdakwa bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM. Bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng telah diketahui oleh terdakwa, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 Wita saksi bersama Tim berhasil mendobrak pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang sementara melangkah menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang naik keatas

rumah sedangkan anggota lainnya langsung mengamankan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo yang bersembunyi dibalik sofa diruang tamu selanjutnya saksi membawa saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun kebawah dan duduk didepan kamar terdakwa berhasil melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar plastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam milik Lukman, kemudian saksi sekitar pukul 05.30 Wita berhasil menemukan plastik bening dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi yang ada pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan disaksikan oleh terdakwa pada saat plastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik kosong ukuran besar bersama 1 (satu) sachet besar berisi shabu-shabu berat netto 0,3910 gram, 2 (dua) sachet kecil Kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya

seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan dimeja didepan kamar terdakwa dan disaksikan oleh Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri terdakwa dan orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekirman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- 3) 1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;
- 4) 2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

Yang terdaftardalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan 1 dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM bersama-sama saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2016, bertempat dikampung Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal ketika Terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM yang sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM mengajak saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo menggunakan shabu-shabu kemudian terdakwa membuka lemari untuk mengambil shabu-shabu yang disimpan didalam lemari dan menyimpan diatas meja kecil yang saat itu saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh

Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo melihat shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus; 1 (satu) bungkus besar shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu selanjutnya terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM merakit bong dan mengambil salah satu shabu-shabu kemudian terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM mulai membakar pireks kemudian dipergunakan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo secara bergantian dan setelah selesai sekitar jam 24.00 Wita saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo menyanyi-nyanyi dengan elekton bersama saksi candra sambil minum angker bir sedangkan terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM menyimpan bong diatas aquarium yang ada didalam kamar dan 3 (tiga) bungkus shabu-shabu tersimpan dimeja kecil kamar terdakwa RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin. H. HAKIM, kemudian datang saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad yang diakui saksi Rosanti Alias Santi Binti Abd. Samad diperoleh dari saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, sekitar jam 02.40 Wita saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Bantaeng, yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops. Resnarkoba melakukan penggerebekan rumah milik terdakwa yang terletak di Kampung Sasayya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan cara mendobrak pintu depan dan pintu samping rumah milik terdakwa, saksi melihat lampu ruang

depan rumah terdakwa bagian atas dimatikan sehingga saksi memberi kode kepada tim mendobrak karena keberadaan saksi Taufik Randy dan saksi Ismail AM., bersama Tim Satuan Reserse Narkotika Polresra Bantaeng telah diketahui oleh terdakwa, saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Bin H. Ambo, kemudian pada pukul 03.00 Wita saksi bersama tim berhasil mendobrak pintu rumah terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada dalam kamar mandi sambil menyiram air dengan menggunakan timba, sedangkan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang sementara melangkah menuju naik tangga belakang dekat kamar mandi untuk melarikan diri naik keatas rumah, sehingga saksi bersama tim mengejar saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang naik keatas rumah sedangkan anggota lainnya mengamankan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo turun kebawah dan duduk didepan kamar terdakwa, pada saat saksi dikamar terdakwa berhasil melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa menemukan, 3 (tiga) bungkus sachet kosong, 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong, 4 (empat) lembar plastik bening kosong bekas shabu-shabu, 4 (empat) potongan batang pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) lembar Buku Tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam, 2 (dua) buah handphone Android Merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone Merek

Nokia warna hitam milik Lukman, kemudian saksi sekitar pukul 05.30 Wita berhasil menemukan plastik bening dalam lubang pembuangan air didalam kamar mandi yang ada pada saat itu disaksikan oleh saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang, saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan disaksikan oleh terdakwa pada saat plastik tersebut berhasil dikeluarkan dari lubang pembuangan air didalam kamar mandi dengan menggunakan besi panjang yang ujungnya dilengkungkan dan ditemukan 4 (empat) lembar plastik kosong ukuran besar bersama 1 (satu) sachet besar berisi shabu-shabu berat netto 0,3910 gram, 2 (dua) sachet kecil Kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram selanjutnya seluruhnya barang bukti tersebut diletakkan dimeja didepan kamar terdakwa dan disaksikan oleh Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo, istri terdakwa dan orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:771/NNF/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekirman., dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto., menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- 3) 1. Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0,9310 gram adalah positif Metamfetamina;

- 4) 2. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 3,8521 gram adalah positif Metamfetamina;

Yang terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan 1 dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Hasil laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa **RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan Narkotika Gol. 1”**;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet besar Kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 0,9310 gram narkotika jenis shabu-shabu;
 - b. 2 (dua) sachet kecil Kristal bening yang berisi shabu-shabu berat netto 3,8521 gram narkotika jenis shabu-shabu;
 - c. 3 (tiga) bungkus sachet kosong;
 - d. 1 (satu) amplop kecil warna putih yang berisi sachet kosong;
 - e. 4 (empat) lembar plastic bening kosong bekas shabu-shabu;
 - f. 4 (empat) potongan batang pipet warna putih;
 - g. 2 (dua) sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
 - h. 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
 - i. 1 (satu) buah buku catatan bon shabu warna coklat;
 - j. 1 (satu) buah handphone Andromax warna hitam;
 - k. 2 (dua) buah handphone Android merek Oppo warna putih;
 - l. 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - m. 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung lipat warna merah hati;
 - n. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung lipat warna hitam milik tersangka ISMAIL Alias MAE Bin. H. AMANG;
 - o. 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih;
 - p. 1 (satu) gulung kertas aluminium foil;

- q. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dililiti dengan isolasi warna hitam model letter “T”;
- r. 1 (satu) batang besi panjang (alat bantu untuk mengait barang bukti shabu didalam lubang pembuangan air);
- s. **Dirampas untuk dimusnahkan,**
- t. Uang tunai sebesar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saudara RAJAMUDDIN;
- u. Uang tunai sebesar Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) milik saudara ISMAIL Alias MAE Bin. HAMANG;
- v. **Dirampas untuk Negara,**
- w. 1 (satu) lembar ATM Bank BRI atas nama RAJAMUDDIN;
- x. 2 (dua) lembar ATM Bank BNI;
- y. 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri;
- z. 2 (dua) lembar buku tabungan Bank BNI;

Dikembalikan kepada RAJAMUDDIN Alias RAJA Bin H. HAKIM.

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkotika)

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penulisan keterangan saksi mahkota yang telah dikemukakan dalam persidangan itu tidak dituangkan oleh hakim dalam suatu putusan. Dengan kata lain bahwa walaupun diketahui yang diambil

dalam pembuktian itu adalah keterangan saksi mahkota, namun di dalam putusan akan tetap dikemukakan keterangan tersebut dengan keterangan saksi sebagai mana umumnya keterangan saksi biasa.¹⁵

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi mahkota merupakan hasil penerapan dari Pasal 142 KUHAP yang antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lainnya dipisahkan berkas perkaranya (*splitsing*) atau dengan kata lain, tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Konsekuensi dari pemisahan berkas perkara itu maka masing-masing tersangka atau terdakwa disidangkan secara sendiri-sendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya, dan kesaksian yang diberikan oleh masing-masing terdakwa saat menjadi saksi yang diupayakan menjadi alat bukti keterangan saksi atau dapat pula berupa alat bukti surat jika dalam tahap penyidikan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Ini terjadi dalam kasus perkara Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban, dimana hakim menggunakan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang dan saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo atas terdakwa Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim. Dimana hakim mengangkat kedua terdakwa tersebut sebagai saksi karena beberapa alasan, yaitu kurangnya alat bukti dalam persidangan. Adapun dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut berpijak pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

¹⁵ Moh. Bakti Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 6 Januari 2017.

Kedudukan saksi mahkota dalam kasus ini adalah memperberat terdakwa karena terdakwa merasa terpojok atas kesaksian saksi yang berada di bawah sumpah. Saksi mahkota ini akan mengajukan persaksiannya secara benar karena konsekuensinya dia akan diringankan pidananya.

Dalam hal ini Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan Ismail Alias Mae Bin H. Amang sebagai saksi mahkota dibenarkan oleh hakim dihadirkan sebagai saksi dipersidangan. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (27) KUHP, “yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Adapun saksi Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan saksi Ismail Alias Mae Bin H. Amang disini merupakan alat bukti kunci untuk bisa mengadili terdakwa tindak pidana narkoba yakni Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim.

Adapun persaksian Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan Ismail Alias Mae Bin H. Amang dalam kasus tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN. Ban dan dibenarkan oleh majelis hakim adalah:

Saksi MUH. LUKMAN Alias LUKMAN Bin. H. AMBO SANGKALA

- a. Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika;-----

- b. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Kampong Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;-----
- c. Bahwa awalnya saksi sekitar jam 23.00 Wita berada di rumah Terdakwa, bersama Terdakwa dan Ismail Alias Mae sedang memakai shabu-shabu selama kurang lebih 3 jam sampai dengan jam 02.30 Wita, saat saksi bersama Terdakwa dan Ismail Alias Mae memakai shabu-shabu paket ¼ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memakai alat bong, pireks dan korek, setelah shabu-shabu habis, kami pun berhenti dan menyimpan alat-alat tersebut disamping speaker;-----
- d. Bahwa setelah itu saksi hendak tidur dan mematikan lampu namun ketika itu saksi melihat ada sekitar 6 orang didepan rumah Terdakwa, awalnya saksi tidak tahu kalau mereka polisi, baru ketika mereka memanjat pagar baru saksi tahu kalau mereka adalah Polisi, dan selanjutnya Polisi langsung masuk ke dalam rumah;-----
- e. Bahwa shabu-shabu yang saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Ismail Alias Mae dari uang patungan bertiga, dan saat itu Terdakwa yang membelikan shabu-shabunya, sedangkan Terdakwa membeli dari siapa saksi tidak tahu;-----
- f. Bahwa ketika penggeledahan saksi tidak tahu karena saksi sedang tidur;--
- g. Bahwa ketika memakai shabu-shabu saksi melihat pipet dan Handphone Nokia milik saksi, sedangkan buku catatan, sachet kosong dan uang saya tidak lihat;-----

- h. Bahwa saksi memakai shabu-shabu dengan Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan;-----
- i. Bahwa saksi tidak tahu ketika Polisi menemukan barang bukti di rumah Terdakwa;-----
- j. Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut di Kantor Polisi;-----
- k. Bahwa tidak benar kalau saksi menerangkan di berita acara polisi yang terhadap tanggapan Terdakwa ketika ditemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu mengatakan kepada saksi “ *dongku kau* “ maksudnya bodoh kau, dan istri Terdakwa “ *kau paccinikangi* “ maksudnya “ *kamu yang perlihatkan itu bahan* “ dan saya mengatakan “ *taniai* “ maksudnya “ *bukan* ”;-----
- l. Bahwa keterangan di Berita Acara Polisi yang menjelaskan Terdakwa sedang bermain keyboard dan menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu berisi setengah gram sementara bermain keyboard Terdakwa di SMS oleh saudara Candra kalau dirinya mau dijemput oleh Terdakwa dan saudara Candra mau dijemput oleh Terdakwa dan saudara Candra ditelpon dengan mengatakan “ *dimana kujemput?* “ dan setelah menelepon Terdakwa berdiri menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut disela antara keyboard / dibawah keyboard kemudian Terdakwa keluar menjemput Candra. **Keterangan** tersebut benar dan shabu-shabu itulah yang dipakai bertiga dengan saksi, terdakwa dan Ismail Alias Mae;-----

- m. Bahwa keterangan di Berita Acara Polisi dibacakan yang menjelaskan Upah atau gaji yang Terdakwa berikan ketika saksi dan Terdakwa mengantarkan shabu-shabu baik paket 1 (satu) gram, ½ gram atau MP 2, ketika saksi mengantar atau bila saksi sama-sama ke kampung Bonto Malengu Desa Bonto Macinna Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar.

Keterangan tersebut tidak benar;-----

- n. Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi menjelaskan Terdakwa memecah paket shabu tersebut dengan menumbuk dengan menggunakan alat besi berupa palu merk Letter T yang dililit dengan isolasi hitam dengan kira-kira ukurannya sekitar 15 (lima belas) sentimeter dan setelah dipecah dipaket yaitu paket 1 (satu) gram jadinya 10 (sepuluh) sachet shabu, paket setengah gram jadinya 3 (tiga) sachet, paket MP 2 (paket seharga Rp.200.000,-) jadinya 8 (delapan) sachet. **Keterangan** tersebut tidak benar;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi ISMAIL Alias MAE Bin H. AMANG

- a. Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika;-----
- b. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Kampung Sasayya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;-----

- c. Bahwa awalnya saksi sekitar jam 23.00 Wita berada di rumah Terdakwa, bersama Terdakwa dan Muh Lukman Alias Lukman sedang memakai shabu-shabu dengan paket $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memakai alat bong, pireks dan korek yang dipakai bertiga;-----
- d. Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa memasukkan shbau-shabu ke saluran air;-----
- e. Bahwa saksi tidak melihat shabu-shabu di tempat kejadian, saksi baru melihat shabu-shabu ketika di Kantor Polisi;-----
- f. Bahwa saksi kenal dengan Rosanti dan saksi pernah memakai shabu-shabu dengan Rosanti di rumah Bunda;-----
- g. Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah handphone merk Samsung dan uang kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil dari dompet saksi;-----
- h. Bahwa ketika memakai shbau-shabu Terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai penjualan shabu-shabu;-----
- i. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menjual shabu-shabu;-----
- j. Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Mamasa;-----
- k. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha lain yaitu menjual kerikil untuk bahan bangunan;-----

- l. Bahwa Terdakwa juga pernah menjual rumahnya di BTN sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- m. Bahwa saksi, Terdakwa dan Muh Lukman Alias Lukman ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, karena bapaknya Terdakwa, bapaknya Muh Lukman Alias Lukman dan bapak saksi adalah bersaudara;-----
- n. Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi dibacakan saksi tidak membantu ketika Terdakwa berusaha membuang atau menghilangkan barang bukti sebelum petugas datang, tetapi saksi hanya berusaha untuk bersembunyi dengan berlari naik keatas rumah melalui tangga belakang di dalam rumah tersebut. **Keterangan** tersebut adalah tidak benar;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Dari persaksian keduanya tersebut semuanya dibenarkan dan keterangan saksi mahkota jelas benar dan tidak keberatan. Inilah alasan dan pertimbangan hakim mengangkat saksi mahkota dalam kasus narkoba yang kemudian dituangkan dalam bentuk Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Narkoba).

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN. Ban Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana

Pada umumnya, semua orang dapat dijadikan saksi. Adapun pengecualian menjadi saksi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 168 KUHP, yakni:¹⁶

¹⁶ Nasrul Kadir, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 5 Januari 2017.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketigadari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 168 KUHAP dikatakan cukup jelas bahwa kata “bersama-sama sebagai terdakwa” ini terjadi dalam tindak pidana. Adapun solusi agar kesaksian terdakwa satu dapat dipergunakan terhadap terdakwa lainnya agar tidak adanya indikasi pelanggaran HAM didalamnya adalah melalui mekanisme splitsing, dimana jaksa penuntut umum memisahkan berkas perkara antara ketiga terdakwa tersebut antara lain Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim, Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan Ismail Alias Mae Bin H. Amang menjadi berkas-berkas perkara yang akan kemudian dipersidangkan secara terpisah.

Pemisahan perkara dibenarkan oleh Undang-undang, dan penerapannya dimaksudkan agar pembuktian lebih mudah karena terdakwa dalam hal satu perkara bisa dijadikan saksi dan sebaliknya dalam perkara lain. Inilah yang dimaksudkan sebagai saksi terdakwa kedua yang dimana disebut dengan saksi mahkota.

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana, tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Ini jelas dilarang dan dikecualikan dalam KUHAP bahwa semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang bersama-sama dengan terdakwa. Dimana Hakim, jaksa penuntut umum serta pada tahap penyelidikan di kepolisian tentunya mengerti akan permasalahan tersebut, maka solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan memisah perkara ketiganya menjadi perkara yang terpisah-pisah satu sama lain. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota, bukan merupakan hal yang mutlak bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, akan tetapi ini merupakan sebagai pemudahan dalam pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam suatu persidangan.

Bukan suatu hal yang jarang terjadi didalam berbagai putusan di Pengadilan Negeri Bantaeng itu mengangkat keterangan saksi mahkota.¹⁷ Beberapa dari perkara tersebut salah satunya adalah Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban. atas nama terdakwa Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim, Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Ban. atas nama terdakwa Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Ban. atas nama terdakwa Ismail Alias Mae Bin H. Amang. Hakim mengangkat Muh Lukman Alias Lukman Bin H. Ambo dan Ismail Alias Mae Bin H. Amang sebagai saksi atas terdakwa Rajamuddin Alias Raja Bin H. Hakim sebagai saksi mahkota karena kurangnya alat bukti dalam persidangan. Kedudukan saksi mahkota dalam kasus ini adalah

¹⁷ Moh. Bakti Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 6 Januari 2017.

memperberat terdakwa karena terdakwa merasa terpojok atas kesaksian keduanya yang berada dibawah sumpah. Saksi mahkota ini mengajukan persaksiannya secara benar karena sebagai konsekuensinya mereka akan diringankan pidananya.

Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng membenarkan penggunaan saksi mahkota ini, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

Tetapi dalam Pasal 189 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa, “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai proses persidangan. Inilah mengapa saksi mahkota diperdebatkan keberadaannya, dalam pasal ini sudah jelas bahwa terdakwa tidak boleh mempersaksikan persaksiannya untuk orang lain karena secara tidak langsung dia telah mempersaksikan dirinya sendiri melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pertama.

Terlepas dari permasalahan, dimungkinkan terdakwa dapat dijadikan saksi, tindakan tersebut akan sangat berfaedah dalam keberhasilan pembuktian. Keterangan terdakwa yang diberikan diharapkan akan sesuai karena yang bersangkutan mengetahui semua peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Dari penilaian demikian, tercipta istilah “saksi kunci” yang diartikan saksi yang amat penting. Saksi kunci inilah yang dalam praktik hukum kita disamaartikan dengan saksi mahkota.

Dengan demikian dalam proses pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Bantaeng dengan mengajukan saksi mahkota dibenarkan karena beberapa alasan:

- a. Antara kedua terdakwa merupakan perkara yang sama;
- b. Telah dilakukan pemecahan berkas perkara (splitsing) atas keduanya;
- c. Dalam keadaan alat bukti lain yang tidak ada atau kekurangan alat bukti, dan;
- d. Bersedianya seorang terdakwa yang satu untuk bersaksi atas terdakwa yang lain.

Tanpa adanya saksi mahkota, hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang ditujukan oleh penuntut umum, karena dikira saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Dan alasan kekurangan alat bukti inilah yang menjadikan saksi mahkota tetap digunakan dalam proses peradilan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak membahas secara eksplisit tentang keberadaan saksi mahkota, akan tetapi penggunaannya didalam praktek peradilan bukanlah sesuatu yang baru. Saksi mahkota adalah saksi yang dihadirkan oleh para penegak hukum sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana dalam suatu persidangan. Adapun penerapan atas saksi mahkota apabila ingin dihadirkan dalam suatu persidangan yakni jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; antara kedua terdakwa merupakan perkara yang sama; telah dilakukan pemecahan berkas perkara (splitsing) sebagaimana amanat Pasal 142 KUHP; dalam keadaan minim alat bukti; serta bersedianya seorang terdakwa satu untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara terdakwa yang lainnya.
2. Pertimbangan Hakim terhadap penggunaan keterangan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban dituangkan dalam putusan sebagai keterangan saksi biasa sebagaimana saksi pada umumnya. Saksi mahkota dalam pertimbangan oleh Hakim dilandasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, serta

dengan mempertimbangkan Pasal 168 KUHAP yang mengatur tentang pengecualian untuk menjadi saksi dan Pasal 142 KUHAP yang menerangkan diharuskannya perkara dipisah sebagai syarat mutlak atas penggunaan saksi mahkota dalam persidangan, yang dimana tanpa adanya saksi mahkota Hakim tidak bisa memperkuat sisi pembuktian dalam suatu perkara pidana yang tengah dihadapi dipersidangan pengadilan.

B. Implikasi Penelitian

1. Teruntuk kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang, diharapkan untuk membuat Perundang-undangan yang mengatur secara tegas akan keberadaan Saksi Mahkota dalam peradilan pidana. Dikarenakan dari segi sisi kegunaan Saksi Mahkota ini sendiri yang merupakan alat yang penting untuk mengungkap dan membuat terang sebuah kasus perbuatan pidana, maka legalitas atas Saksi Mahkota ini amatlah sangat diperlukan. Oleh karena saat ini belum terdapatnya petunjuk dan aturan yang jelas di dalam KUHAP, maka diharapkan agar dapatlah dibuat sebuah aturan perundang-undangan khusus yang menjelaskan mengenai saksi mahkota dikemudian hari.
2. Dalam penerapan peradilan pidana, setiap penegakan dan penerapan hukum terutama pada penerapan saksi mahkota dalam suatu persidangan, haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Adapun penghargaan pengurangan pidana kepada terdakwa yang telah bersedia menjadi saksi mahkota amatlah sangat diperlukan. Semuanya bergantung kepada kebijaksanaan Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hakim sebagai penentu akhir dari sebuah putusan peradilan, memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam suatu perkara, diharuskan mempunyai wawasan yang luas dan bersikap adil serta bijaksana agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, A.Z dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 3 – Percobaan dan Penyertaan*. Cet. V ; Jakarta : Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet VIII; Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jayadi, Ahkam. 2015. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum – Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*. Yogyakarta : Genta Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta : Erlangga.
- Khaleed, Badriyah. 2014. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia – Sebuah Pengantar*. Malang : Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Cet. VII ; Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Sufirman dan Nurul Qamar. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Cet II; Bogor : Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 2013. *Kamus Hukum*. Cet. XV ; Jakarta : Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta : UI-Press.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politera.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar : Kencana.
- Suriasumantri, Jujun. S. 2010. *Filsafat Ilmu – Sebuah Pengantar Populer*. Cet. XXII; Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi – Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus – Desain & Metode*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana – Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press.

Sumber Artikel:

- Wibowo, Dwinanto Agung. 2011. *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Zulhendra, Joni. 2010. *Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam*. Padang : IAIN Imam Bonjol.

Sumber Internet:

- HukumOnline. 2012. *Definisi Saksi Mahkota*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota/>. Diakses tanggal 23 Juni 2014.
- HukumOnline. 2013. *Keabsahan Penggunaan Saksi Mahkota sebagai Saksi di Persidangan*.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan/>. Diakses tanggal 23 Juni 2014



Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata – Gowa

Assalamu Alaikum Wr Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER
NIM : 10500113151
Semester/Klpk : VII (Tujuh) / 5 - 6.
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan judul skripsi sebagai berikut :

1. PENGARUH KETERANGAN SAKSI MAHKOTA TERHADAP PUTUSAN HAKIM.
2. KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA INDONESIA.
3. PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA OLEH JAKSA PU DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH (SPLITSING).

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Wassalam Alaikum Wr Wb.*

Samata, 2 September 2016

Mengetahui,
Penasehat Akademik

(ERLINA, S.H., M.H.)
NIP : 19691219 200501 2 003

Pemohon,

(MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 503 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : **1. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.**
2. Erlina, S.H., M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : **Muhammad Thamrien Chaier**
N I M : **10500113151**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **"Kedudukan Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng"**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 7 Oktober 2016



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI.3A/PP.00.9/2036/2016

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. **Muhammad Thamrien Chaier**/ 10500113151

Kepada Yth;

1. **Rahman Syamsuddin, SH., MH**

2. **Erlina, SH. MH**

Di-

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II.

Samata

Bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016

Waktu : 13.00 WITA - selesai

Tempat/Ruangan : Jurusan Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"kedudukan Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia (studi Kasus Pengadilan Negeri Bantaeng)"**

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Samata, 21 Oktober 2016



Sejabat Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum

Rahman Syamsuddin SH. MH

NIP. 198212072009011010

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM
PRAKTEK PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Disusun dan diajukan Oleh :
Muhammad Thamrien Chaier
NIM : 10500113151

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi
Pada tanggal : 7 Desember 2016


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



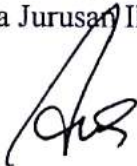
Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
NIP. 198212072009011010

Pembimbing II



Erlina, S.H., M.H.
NIP. 196912192005012003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, S.H., M.H.
NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag.
NIP. 10621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.9/ 3090/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 22 Desember 2016

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Muhammad Thamrien Chaier
N I M	: 10500113151
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Semester	: VII (tujuh)
Alamat	: Jl. Abd.Muthalib Dg.Narang No.99A Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

“ Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia ”.

Dengan dosen pembimbing:

1. **Rahman Syamsuddin., SH.,M.H**
2. **Erlina, SH., M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kab.Bantaeng terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 15818/S.01P/P2T/12/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Kab. Bantaeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/3090/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER
Nomor Pokok : 10500113151
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA INDONESIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Desember 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat / Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP BKPM 23-12-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PENGADILAN NEGERI BANTAENG

JALAN ANDI MANNAPPIANG NO.15

TELP. (0413) 21193 – FAX (0413) 21196

KABUPATEN BANTAENG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 1/Srt/HK/2017/PN Ban.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER**

No. Pokok : 10500113151

Fak/Prog.Studi : Hukum/Illmu Hukum

Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bahwa benar yang bersangkutan berdasarkan Surat No. 15818/S.01P/P2T/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, perihal Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "*Pembuktian saksi Mahkota dalam praktek peradilan Pidana Indonesia*", telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017.

Demikian Surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 9 Januari 2017

Wakil Panitera,



PATUNRENGI, SH.

Nip. 19641231 198603 1042

PENGADILAN NEGERI BANTAENG
Jalan Andi Mannapiang No. 15, Telp (0414) 21196, Kab. Bantaeng

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nasrul Kadir, SH.*
Alamat : *Jl. S. Bialo*
Pekerjaan : *Hakim*

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Thamrien Chaier
NIM : 10500113151
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Abd Muthalib Dg. Narang No. 99, Kab. Gowa.

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 5 Desember 2017
Januari

Yang Diwawancarai

Nasrul Kadir, SH

PENGADILAN NEGERI BANTAENG
Jalan Andi Mannapiang No. 15, Telp (0414) 21196, Kab. Bantaeng

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRUK. BERTI WUBOYO, SH
Alamat : BANTAENG
Pekerjaan : HAKIR

Menerangkan bahwa,


Nama : Muhammad Thamrien Chaier
NIM : 10500113151
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Abd Muthalib Dg. Narang No. 99, Kab. Gowa.

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 6 Juni 2017 -
Desember 2016

Yang Diwawancarai


M. BERTI WUBOYO, SH

PENGADILAN NEGERI BANTAENG
Jalan Andi Mannapiang No. 15, Telp (0414) 21196, Kab. Bantaeng

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamzam, S.H.
Alamat : BTN. Sasayya Bantaeng
Pekerjaan : Advokat / Pengacara

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Thamrien Chaier
NIM : 10500113151
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Abd Muthalib Dg. Narang No. 99, Kab. Gowa.

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 10 Januari 2017

Yang Diwawancarai



Zamzam, S.H.

PENGADILAN NEGERI BANTAENG
Jalan Andi Mannapiang No. 15, Telp (0414) 21196, Kab. Bantaeng

KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Najmawati, SH.*
Alamat : *BTN. Sasayya Bantaeng*
Pekerjaan : *Advokat / Pengacara*

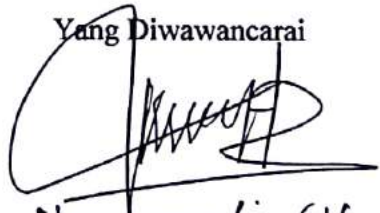
Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Thamrien Chaier
NIM : 10500113151
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Abd Muthalib Dg. Narang No. 99, Kab. Gowa.

Benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 10 Januari 2017

Yang Diwawancarai

Najmawati, SH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi Saudara **Muhammad Thamrien Chaier**, NIM: **10500113151**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 Agustus 2017

Pembimbing I



Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
NIP. 198212072009011010

Pembimbing II



Erlina, S.H., M.H.
NIP. 196912192005012003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 13/1 Tahun 2017
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
N a m a : Muhammad Thamrien Chaier
N I M : 10500113151
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Agustus 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN. Ban)".
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I
Penguji II : Drs. H. Munir Salim, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 28 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;

Nomor : SI.1/PP.00.9/2364 /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 28 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekretaris)
 3. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I. (Penguji I)
 4. Drs. H. Munir Salim, M.H (Penguji II)
 5. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (Pembimbing I)
 6. Erlina, S.H., M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

N a m a : Muhammad Thamrien Chaier
N I M : 10500113151
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 30 Agustus 2017
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 190210161990031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Thamrien Chaier**, Nim. **10500113151**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2016/Pn.Ban)"**. Memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 25 November 2017

Pembimbing I



Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
NIP. 19821207 200901 1 010

Pembimbing II



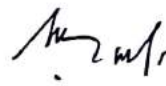
Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19691219 200501 2 003

Penguji I



Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I
NIP. 19600817 199203 1 001

Penguji II



Drs. H. Munir Salim., M.H
NIP. 19531231 197803 1 006

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 54 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2018
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan **Muhammad Thamrien Chaier**, NIM : 10500113151 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi IH tanggal 23 Januari 2018 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif

Pertama : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NO	NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
1	Muhammad Thamrien Chaier	Dra. Hj. Hartini, M.H.I	Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	Dr. Marilang, S.H, M.H	Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid

Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2013;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samata Gowa
Januari 2018
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 267 Tahun 2018

TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Muhammad Thamnen Chaier
NIM : 10500113151
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2018
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skrpsi
Judul : "Pembuktian Saksi Mahkota dalam Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid Sus/2016/PN Ban)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skrpsi.
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji.
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembedaan Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skrpsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I.
Penguji II : Drs. H. Munir Salim, M.H.
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.
2. Nasirah Asri, S.Kom.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skrpsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan

: Samata Gowa
: Februari 2018

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Nomor : B015/SH.01/PP.00.9/02/2018
Sifat : Penting
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata Gowa, Februari 2018

Kepada

Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I. (Penguji I)
4. Drs. H. Munir Salim, M.H. (Penguji II)
5. Rahman Samsuddin, S.H., M.H. (Pembimbing I)
6 Erlina, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muhammad Thamrien Chaier
N I M : 10500113151
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2018
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD THAMRIEN CHAIER merupakan anak pertama dari pasangan Thamsar, S.P., M.Si dan Chaeran Rasyid. Lahir di Ujung Pandang, 20 Januari 1996. Tumbuh dan berkembang di Kabupaten Gowa, Kota Makassar. Dalam jenjang pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 7 Batangkaluku tamat pada tahun 2007, selanjutnya di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bontomarannu tamat pada tahun 2010, selanjutnya meneruskan di Sekolah Menengah Atas PGRI Sungguminasa dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan tergabung dalam beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), UKM Tapak Suci UIN Alauddin Makassar dan Alauddin Law Study Centre (ALSC).

Penulis dapat dihubungi melalui:

E-mail : muhthamrin.andhink@gmail.com